

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Korea Selatan dan Korea Utara mengalami perang dingin selama 63 tahun. Semenanjung Korea pada awalnya dikuasai oleh Jepang, namun karena kekalahan Jepang menyebabkan lahirnya dua negara Korea yang masing-masing berada di bawah pengaruh Uni Soviet (Korea Utara) dan Amerika Serikat (Korea Selatan) sebagai pemenang perang dunia II saat itu. Di Korea bagian selatan lahir pemerintahan baru berlandaskan sistem demokrasi dan kapitalisme, sedangkan di Korea bagian utara atas dukungan Uni Soviet lahir pemerintahan berdasarkan komunisme (KBS World, Sejarah Korea 2012, hlm.1). Setelah beberapa tahun kemudian karena adanya perbedaan ideologi di antara keduanya, maka terjadilah perang Korea dari tahun 1950-1953. Ketegangan antara kedua bagian Negara Korea ini semakin meningkat. Pada tanggal 25 Juni 1950, militer Korea Utara menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi terhadap Korea Selatan. Penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan mempunyai alasan yang sangat kuat, alasan utama dari Korea Utara adalah untuk menyatukan kembali saudara-saudaranya yang berada di sebelah selatan yang telah dikuasai oleh Amerika Serikat (Tim Global Future Institute, Kilas Balik Serbuan Korea Utara ke Korea Selatan Juni 2009, hlm.1). Penyerangan ini menjadi awal pecahnya Perang Korea yang berlangsung selama 3 tahun. Peserta utama dari perang Korea ini adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan bersekutu dengan Amerika Serikat dengan cara mengirimkan pasukan perang sedangkan Korea Utara bersekutu dengan Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet.

Aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan khususnya di bidang militer telah terjalin sejak lama. Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pertahanan pada 1 Oktober 1953 setelah berakhirnya perang Korea. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat aliansi dan menjamin Korea Selatan untuk mendapatkan

perlindungan militer Amerika Serikat terhadap ancaman-ancaman eksternal khususnya Korea Utara (SAIS, US-Korea Security Alliance 2007, hlm.1). Semenanjung Korea sebenarnya masih dihadapkan pada kondisi perang karena baik Korea Utara maupun Korea Selatan belum memiliki kesepakatan untuk berdamai. Apalagi sejak berakhirnya perang Korea, Korea Utara masih sangat mengancam Korea Selatan dan mengembangkan senjata nuklirnya. Melihat hal itu, Korea Selatan merasa terancam dan perlu untuk memiliki pihak yang dapat melindunginya apabila sewaktu-waktu Korea Utara kembali melakukan serangan terhadap Korea Selatan. Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan perjanjian pertahanan kembali pada tanggal 17 November 1954 yang mengatur jika salah satu negara diserang oleh pihak ketiga maka pihak lain akan bertindak. Kesepakatan ini meliputi bantuan militer dan ekonomi (*Defense White Paper 2012, p.334*). Amerika Serikat merupakan pelindung utama bagi Korea Selatan dan juga Korea Selatan merupakan basis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Altileri dan rudal konvensional Korea Utara masih menjadi hal yang sangat menakutkan, karena bisa menyebabkan banyak korban dan kerusakan parah di Seoul, yang terletak hanya 50 kilometer dari selatan perbatasan. Pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi menimbulkan gempa berkekuatan 4,2 Mb (body wave magnitude) yang langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang (Voa Indonesia, *Catat Kemajuan Program Nuklir Korea Utara 2006, hlm.1*). Uji Coba ini dipandang mengancam stabilitas regional. Pada saat itu, Korea telah mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional dan PBB, untuk segera menghentikan program nuklirnya.

Dalam Buku Putih Pertahanan Korea Selatan tahun 2012, dituliskan salah satu ancaman utama Korea Selatan adalah nuklir Korea Utara. Sejak tahun 1965, Korea Utara melakukan pengembangan nuklir (KBS World, *Kronologi Program Nuklir Korea Utara 2014, hlm.1*). Pengembangan yang dilakukan oleh Korea Utara mungkin baik bagi negaranya sendiri tetapi tidak untuk negara lain seperti Korea Selatan yang

berkonflik dengan Negara Korea Utara dan tentunya juga bagi Amerika Serikat yang merupakan aliansi Korea Selatan karena dianggap telah mengganggu ketenangan negara lain. Meningkatnya ketegangan di Asia Timur hanyalah sebagian dari perjalanan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya sejak tahun 1965 dan pada 5 April 2009 lalu, Korea Utara akhirnya meluncurkan roket, di Musdanri propinsi Hamgyeng Utara (KBS World, Korea Utara Meluncurkan Roket Jarak Jauh 2009, hlm.1).

Perkembangan teknologi senjata nuklir Korea Utara menimbulkan kecemasan pada negara-negara internasional terutama Amerika Serikat dan Korea Selatan. Amerikat Serikat segera menempatkan pasukan utama angkatan daratnya di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, selain itu Korea Selatan sendiri memastikan pasukannya siap untuk kondisi perang yang mungkin saja bisa terjadi. Pengembangan teknologi nuklir yang dilakukan Korea Utara menjadikan DK PBB mengeluarkan resolusi kepada Korea Utara, salah satunya DK PBB No. 1718 yaitu larangan pengiriman barang-barang mewah ke Korea Utara oleh negara-negara anggota PBB, negara lain berhak menginspeksi kapal kargo dari dan keluar Korea Utara, melarang negara-negara anggota PBB melakukan perdagangan yang menyangkut segala sesuatu komponen maupun bahan yang dapat mendukung program pengembangan nuklir Korea Utara, menyerahkan Korea Utara untuk secepatnya kembali ke forum *Six Party Talks* untuk menyelesaikan masalah ini secara damai (Charles, World: Iran-North Korea Present Proliferation Challenge 2006, hlm.1). *Six Party Talks* merupakan sebuah mekanisme multilateral yang bertujuan untuk mewujudkan upaya denuklirisasi Korea Utara melalui proses negosiasi yang melibatkan Cina, Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang. Tujuan utama diselenggarakannya *Six Party Talks* adalah menuntaskan proses denuklirisasi Korea Utara, mengakhiri Perang Korea melalui sebuah traktat perdamaian, dan membangun mekanisme regional untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Asia Timur (Jayshree & Beina, The Six Party Talks on North Korea's Nuclear Program 2013, hlm.1).

Resolusi DK PBB No. 1718 ternyata belum mampu membendung agresifitas serangkaian uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal ini akhirnya membuat Korea Selatan menyetujui bergabung dalam PSI (Proliferation Security Initiative) pada tanggal 26 Mei 2009 yang diajukan oleh Amerika Serikat. PSI merupakan gagasan dari mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush pada 31 Mei 2003 di Cracow Polandia. Pada saat itu, PSI diratifikasi oleh 11 negara yaitu, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Inggris, Australia, dan Jepang dengan tujuan untuk mencegah meluasnya senjata pemusnah massal atau *Weapon of mass destruction* yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan dunia (Mary Beth Nikitin 2012, p.3). Kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam kerangka PSI ini dikarenakan adanya ancaman senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara terhadap kestabilan kawasan di Semenanjung Korea. Selain itu, bagi Korea Selatan masalah ini akan berdampak langsung karena Korea Utara merupakan negara terdekat Korea Selatan, apalagi mengingat sejarah kedua negara ini memiliki masa lalu yang sampai skarang belum bisa dilupakan oleh kedua negara tersebut.

PSI sendiri merupakan upaya secara global untuk menghentikan penyelundupan senjata pemusnah massal atau *Weapon of Mass Destruction* (WMD), sistem pengirimannya dan material-material yang berhubungan dengan senjata pemusnah massal dari dan ke pelaku negara dan non-negara di seluruh dunia. Senjata pemusnah massal yang dimaksud antara lain meliputi senjata kimia, biologi, nuklir dan lain lain yang dapat menyebabkan kehancuran secara luas. PSI memiliki perbedaan dengan pola-pola kerjasama pertahanan keamanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan sebelumnya. Dalam aktifitasnya PSI lebih intensif, seperti penyinggahan, pengamanan, pencarian dan penyitaan terhadap kapal-kapal negara asing yang dicurigai membawa bahan-bahan nuklir untuk senjata.

Dalam kebijakan pertahanan Korea Selatan, disebutkan salah satu tujuan pertahanan nasional dan kepentingan nasional dari Korea Selatan yaitu melindungi negara dari ancaman militer eksternal dan invasi. Korea Utara merupakan ancaman serius bagi keamanan Korea Selatan dengan mengembangkan dan meningkatkan daya

skala besar konvensional militer, program nuklir, rudal, dan senjata pemusnah massal lainnya, dan dengan terus melakukan tindakan provokasi bersenjata seperti serangan terhadap Kapal Cheonan dan penembakan terhadap Yeonpyeongdo (pulau). Maka dari itu, Korea Selatan membangun persekutuan atau bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam kerangka PSI demi memperjuangkan kepentingan nasional negaranya yaitu melindungi negaranya dari ancaman eksternal dan invasi.

I.2 Rumusan Permasalahan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa yang menjadi pertanyaan penelitian adalah : **Bagaimana Kerjasama Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam *Proliferation Security Initiative* (PSI) Dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara Yang Terus Meningkat Periode 2009-2012 ?**

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan mengenai langkah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam *Proliferation Security Initiative* (PSI) menghadapi ancaman nuklir Korea Utara
- b. Memperoleh gambaran mengenai *Proliferation Security Initiative* (PSI) dari awal terbentuknya dan perkembangannya.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data dalam studi Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan kerjasama pertahanan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan kerjasama pertahanan.

I.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa ahli telah membuat penelitian buku maupun jurnal yang berhubungan dengan permasalahan kerjasama PSI antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.

I.5.1 Ancaman nuklir Korea Utara

Dalam jurnal *North Korea's Military Threat: Pyongyang's Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missiles (2007)* dijelaskan sejak lahirnya Demokratik Rakyat Korea pada tahun 1948, rezim Pyongyang telah memiliki dua tujuan strategis nasional yaitu kelangsungan rezim dan reunifikasi Semenanjung Korea dibawah kendali Korea Utara. Militerisme tetap merupakan aspek penting dari Korea Utara dan angkatan bersenjata merupakan elemen sentral. Tentara rakyat Korea merupakan elemen inti untuk merealisasikan strategi nasional Korea Utara. Strategi ini juga merupakan prioritas utama terhadap isu-isu militer dan Korea Utara merupakan negara yang paling militer di muka bumi diukur dengan berbagai indikator.

Doktrin militer Korea Utara telah bergeser secara dramatis dari doktrin perang regular ke sebuah doktrin yang dianut perang rakyat. Kim Il Sung menganut empat garis militer yaitu senjata seluruh penduduk, membentengi seluruh negeri, melatih seluruh pasukan sebagai kader tentara dan memodernisasi persenjataan, doktrin, dan taktik dibawah prinsip Juche dalam pertahanan nasional. Korea Utara memiliki senjata pemusnah massal yang signifikan dan program rudal balistik. Senjata nuklir hampir dapat dipastikan berada dalam pikiran Kim Il Sung dari 1945 dan seterusnya. Kim Il Sung sangat terkesan dengan kekuatan bom yang digunakan di Hiroshima dan Nagasaki, baik dari segi kapasitas destruktif dan nilainya sebagai senjata politik. Upaya pencarian yang dilakukan Korea Utara untuk program nuklir dimulai pada tahun 1950-an. Korea Utara setidaknya memiliki cukup plutonium untuk membuat beberapa bom nuklir. Dilihat dari beberapa hal, tampaknya doktrin nuklir Korea Utara difokuskan untuk menghalangi serangan oleh Amerika Serikat dan sebagai cara untuk mendapatkan pengaruh di meja perundingan.

Korea Utara telah memiliki program balistik untuk lebih dari empat dekade. Program yang diciptakan Kim Il Sung, telah menjadi prioritas atas nasional sejak awal. Memanfaatkan bantuan teknologi dari beberapa negara, teknisi asing dan ilmuwan, dan *reverse engineering*. Pyongyang telah berhasil dalam membangun basis manufaktur rudal balistik yang kredibel. Tahap pertama yang di produksi adalah rudal jarak pendek untuk di ekspor dan penyebaran domestic, tahap kedua menghasilkan rudal jarak menengah yang sama dan dalam fase ketiga, Korea Utara telah beralih ke penelitian dan pengembangan dan uji, penyebaran atau ekspor rudal jarak jauh. Rudal jarak pendek dan jarak menengah awalnya di produksi untuk pertahanan dan pencegahan terhadap Amerika Serikat dan Korea Selatan, namun bisa saja rudal digunakan dengan ofensif. Pyongyang mengakui bahwa ada pasar untuk rudal dan bisa mendapatkan keuntungan dari ekspor rudal balistik. Program rudal yang dijalan Korea Utara juga menjadi simbol penting untuk menaikkan martabat Korea Utara baik domestik maupun internasional.

Jurnal ini hanya terfokus pada alasan Korea Utara membangun kekuatan nuklir dan keuntungan yang di dapat dengan melakukan ekspor impor rudal balistik. Tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana besarnya ancaman nuklir Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Untuk itu saya berharap kajian saya tentang ancaman nuklir Korea Utara ini dapat mengungkapkan beberapa fakta tentang besarnya ancaman nuklir Korea Utara bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat yang tidak diungkapkan atau bahkan disembunyikan. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana cara untuk menghentikan ancaman nuklir Korea Utara yang terus mengancam Korea Selatan yaitu Kerjasama *Proliferation Security Initiative* (PSI) antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.

I.5.2 Proliferation Security Initiative (PSI)

Jurnal Implementasi Kerjasama Pertahanan Keamanan Antara Amerika Serikat dan Korea Selatan Dalam Kerangka Proliferation Security Initiative (PSI) 2009. Jurnal ini ditulis oleh Isni Hartati. Jurnal ini mengulas tentang pelaksanaan kerjasama

pertahanan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam kerangka PSI pada tahun 2009. Pengembangan senjata nuklir Korea Utara menimbulkan kecemasan pada negara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Mei 2009, Korea Selatan menyetujui untuk bergabung kedalam PSI atas ajakan Amerika Serikat. Aktifitas PSI itu sendiri berupa VBSS atau *visit* (penyinggahan), *board* (pengamanan), *search* (pencarian), *seizure* (penyitaan) atau secara umum dikenal dengan *henrikhan*. Dimana suatu kapal yang berlayar di laut apapun (territorial maupun bebas) bila dicurigai maka dapat dilakukan prosedur penghentian dan pemeriksaan dan bila diduga membawa senjata pemusnah massal atau materialnya maka kapal tersebut dapat ditahan.

Adapun upaya yang secara khusus mengatur dalam penekanan Amerika Serikat terhadap Korea Utara ada dalam upaya PSI yaitu *Illicit Activities* (Aktifitas Terlarang), dimana Amerika Serikat bersama sekutunya menekan pemerintah Korea Utara agar mau menandatangani perjanjian *Proliferation Nuclear* (Proliferasi Senjata Pemusnah Massal). Pada intinya Amerika Serikat dan sekutunya mengangkat isu-isu dan berita yang menyatakan bahwa Pemerintah Korea Utara terlibat dalam perdagangan obat terlarang, penyelundupan baik senjata maupun barang-barang lainnya, money laundring dan lain-lain (Isna Hartati 2009, hlm. 234).

Dalam hal mengimplementasikan PSI kedua negara menyiapkan pengadaan perlengkapan militer dan latihan militer bersama. Namun, dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki peran lebih untuk pengadaan alat-alat militer canggih berupa pesawat jet, kapal induk dan kapal-kapal penyerang maupun senjata-senjata perang. Untuk mengimbangi kekuatan Korea Utara, Amerika Serikat menyiapkan kapal induk bertenaga nuklir yang dimiliki oleh armada ke tujuh Amerika Serikat yang masih berada di Yokosuka, Jepang. Setelah bergabung dalam PSI, Korea Selatan melakukan pemantauan terhadap kapal-kapal di Semenanjung Korea. Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga melakukan latihan pertahanan secara besar-besaran untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan Korea Utara.

Jurnal ini hanya terfokus pada pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam kerangka PSI pada tahun 2009 tanpa melihat lebih

dalam permasalahan yang menurut saya harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk itu saya membuat kajian tentang efektifitas PSI dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara yang belum diungkapkan. Dari jurnal tersebut terlihat bahwa pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam kerangka PSI telah sangat bagus dan kedua negara telah melakukan banyak cara untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, oleh karena itu saya akan mencoba mengulas efektifitas kerjasama PSI antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara.

Dalam jurnal *Proliferation Security Initiative: an assessment (2004)* dijelaskan PSI didirikan pada bulan Mei 2003. PSI didirikan sebagai jalan pintas untuk menangani sisi penawaran dan permintaan perdagangan global dengan aktor negara dan non negara terkait senjata pemusnah massal. Kekuatan awal PSI hanyalah beberapa negara saja. Sebagian besar adalah sekutu Amerika Serikat dan anggota NATO. Tindakan yang diambil di bawah PSI akan konsisten dengan hukum internasional. Namun, intersepsi sewenang-wenang kapal asing di laut lepas atas nama PSI melanggar nilai historis “kebebasan di laut lepas” yang sangat vital bagi perdagangan global. PSI konsisten dan merupakan langkah pada penerapan pernyataan dewan keamanan PBB yang menyatakan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

PSI berguna untuk melengkapi upaya dalam melawan proliferasi senjata pemusnah massal. Tapi perlu mendapatkan persetujuan dari negara bendera (*Flag States*) untuk melakukan intersepsi atau pencegahan di laut. Karena intersepsi atau pencegahan kapal asing sama saja dengan tindakan agresif. Proliferasi senjata pemusnah massal merupakan ancaman besar bagi umat manusia. Amerika Serikat telah memprakarsai PSI untuk melawan proliferasi senjata pemusnah massal, tetapi dalam bentuknya yang sekarang, PSI bertentangan dengan prinsip yang ada di laut lepas. Namun, perjanjian bilateral sebagai perluasan dari PSI mungkin secara sah melengkapi upaya non-proliferasi global. Solusi komprehensif terletak pada keterlibatan PBB dan segregasi ancaman.

Jurnal yang ditulis oleh G. S. Khurana ini hanya berfokus pada cara PSI melawan proliferasi senjata pemusnah massal tanpa membahas secara spesifik negara-negara yang melakukan perdagangan senjata pemusnah massal untuk mengembangkan teknologi nuklirnya seperti negara Korea Utara. Kajian saya mengenai PSI akan fokus pada negara Korea Utara yang mengembangkan teknologi nuklirnya, di mana saya akan menjelaskan kerjasama yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tergabung dalam PSI dan merasakan ancaman dari nuklir Korea Utara serta apa saja upaya yang dilakukan kedua negara untuk menghentikan nuklir Korea Utara. Selain itu, saya akan mencoba melihat efektifitas PSI dalam menghentikan nuklir Korea Utara yang terus meningkat.

I.6 Kerangka Teori

I.6.1 *Collective Security*

Sepanjang abad ke-20 dan bahkan lebih lagi di abad ke-21, makna dan isi dari keamanan semakin diperdebatkan. Keamanan telah banyak berkembang dari fokus eksklusif pada kedaulatan negara, teritorial, geopolitik tradisional, nilai-nilai yang lebih manusiawi dan prioritas. Pergeseran konseptual mendasar datang dengan perubahan teknis untuk praktek dari keamanan kolektif. Semenjak masyarakat internasional menyepakati definisi keamanan tradisional atas dasar yang telah didirikan oleh PBB pada tahun 1945, konsep ini telah diperluas dan diperdalam dengan gagasan keamanan manusia. Tujuan dari keamanan kolektif dan PBB adalah untuk mengkonsolidasikan keadaan dan mengelola hal yang tak terduga. Dengan membantu masyarakat internasional untuk menyepakati fakta dan rutinitas tertentu di dalam dan di kolektivitas dan kelembagaan (Jibecke Joensson 2009, p.6). Dengan adanya persetujuan dari Piagam PBB pada tahun 1945, sebuah proyek internasional dalam kapasitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari segi jumlah negara yang setuju untuk mematuhi pengaturan keamanan kolektif tertentu dimulai dengan sebuah proses pelebagaan internasional dan pemahaman bersama tentang keamanan.

Pada awalnya, keamanan kolektif merupakan suatu cara untuk perang, hal ini berdasarkan asumsi tradisional. Keamanan kolektif diatur dalam sistem negara,

terikat pada struktur anarkis dan kepentingan pribadi. Keamanan kolektif ditegakkan dengan kekerasan dan kekuasaan politik tradisional dan dinilai dengan hanya mempertimbangkan kebutuhan keamanan jangka pendek suatu negara, dalam hal ini berkaitan dengan skenario logika terburuk. Tapi setelah perang dingin berakhir, keamanan datang semakin jauh dari pemahaman tradisional dan realis serta keamanan kolektif juga bergeser dari politik kekuasaan. Pelaksanaan keamanan kolektif tergantung pada perjanjian internasional tentang bagaimana prinsip-prinsip universal di mana negara-negara telah sepakat terkait dengan suatu ancaman tertentu. Pemeliharaan perdamaian dan penilaian keamanan internasional merupakan latar belakang yang membenarkan keamanan kolektif, hal ini adalah pengaturan menyeluruh serta rincian prakteknya (*Ibid*). Dalam sebuah kerjasama pertahanan untuk mewujudkan rasa aman, negara-negara cenderung bekerjasama dalam mewujudkan keamanan bersama (*Collective Security*) di suatu kawasan untuk menghadapi musuh bersama. Menurut Ernst Haas, *Collective Security* adalah sistem global atau regional di mana semua negara anggota saling menjamin satu sama lain bahwa siapapun yang mengganggu perdamaian akan dihadapi bersama (Mohtar Mas'oed 1989, hlm.161).

Keamanan kolektif atau *collective security* dapat dipahami sebagai pengaturan keamanan di mana semua negara bekerjasama secara kolektif untuk menyediakan keamanan bagi semua anggota *collective security* dari tindakan kelompok-kelompok yang mungkin menantang tatanan yang ada dengan menggunakan kekerasan atau power. Selain itu, *collective security* adalah mewujudkan keamanan global dengan prinsip serangan terhadap suatu negara dapat diartikan juga sebagai serangan atas semua negara. Konsep ini dimanifestasikan sebagai prinsip dalam pembentukan lembaga dunia seperti PBB.

I.6.2 Proliferasi Nuklir

Usia nuklir dimulai dengan perlombaan dimana Amerika Serikat berusaha mengembangkan senjata nuklir sebelum negara musuh melakukan hal yang sama. Ironisnya perlombaan senjata hanya terdiri dari satu peserta yaitu Amerika Serikat.

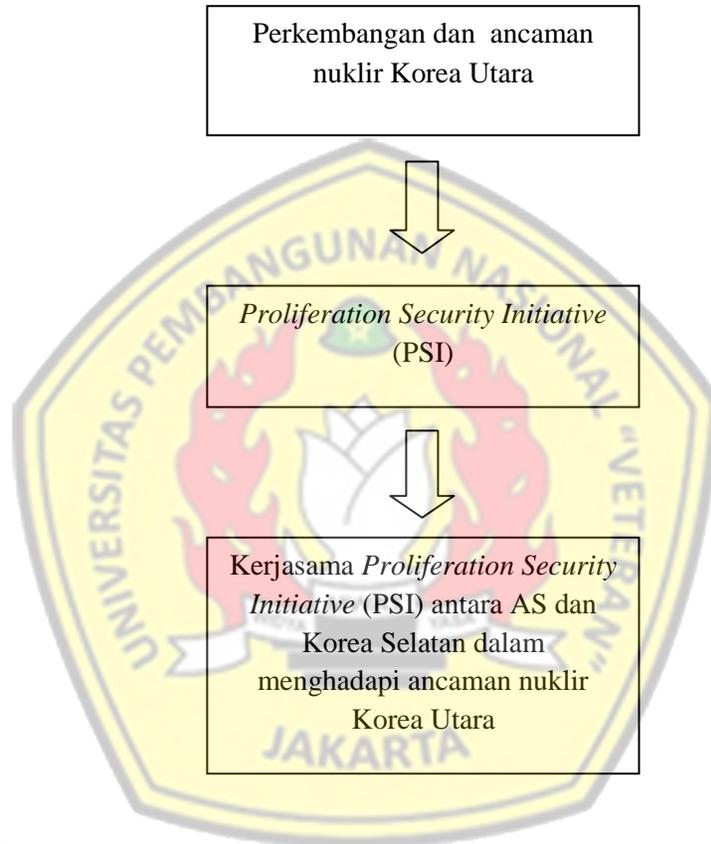
Pada 1930, terobosan dalam fisika nuklir diperingatkan beberapa ilmuwan untuk kemungkinan peneuan bom atom. Beberapa ilmuwan ini, termasuk Leo Szilard (1898-1964), Edward Teller (1908-2003), dan Eugene Wigner (1902-1995), telah datang untuk tinggal di Amerika dalam penerbangan dari bangkitnya fasisme di Eropa. Pikiran pertama mereka, setelah menyadari bahwa bom atom dapat dibangun adalah bahwa Adolf Hitler memiliki pengetahuan tersebut untuk membangun bom tersebut. Jadi, pada musim panas tahun 1939, Szilard, Teller, dan Wigner memutuskan untuk membujuk pemerintah Amerika untuk mengembangkan bom pertama (Philip Marguiles 2008, p.4).

Proliferasi nuklir dapat digunakan untuk menggambarkan penyebaran senjata nuklir, material fisil, senjata-senjata lain yang memanfaatkan teknologi-informasi yang berkaitan dengan nuklir. Proliferasi nuklir dibagi dalam dua pengertian yaitu, secara proliferasi horizontal dan proliferasi vertikal. Proliferasi horizontal berarti meluasnya kemampuan membuat dan menguasai senjata nuklir banyak negara, sedangkan proliferasi vertikal adalah peningkatan kuantitas dan kualitas nuklir yang dimiliki oleh negara-negara yang telah menguasai senjata nuklir (A.R. Sutopo 1986, hlm.53).

Ada 3 peringatan penting yang harus diperhatikan terkait proliferasi nuklir (Paul 2008, hlm.363). Pertama, senjata nuklir hanya digunakan untuk melawan musuh tetapi tetap ada ketakutan yang dirasakan oleh negara-negara yang tidak memiliki nuklir terhadap negara yang memiliki nuklir. Tidak ada tindakan pencegahan atau perlindungan yang efektif yang dapat mengurangi serangan nuklir. Selain itu, meskipun senjata nuklir tidak dilarang oleh hukum internasional, tetapi apabila kita lihat sifat dahsyat dan daya ledak nuklir yang begitu kuat, maka akan sulit untuk membayangkan apabila suatu negara yang memiliki nuklir menggunakan nuklir untuk hal-hal selain melawan musuh. Kedua, proliferasi senjata antara negara-negara nuklir baru seperti Korea Utara dan mungkin Iran, adalah sebagai kekhawatiran yang banyak dirasakan oleh negara-negara, selain itu Britania Raya juga mengambil keputusan untuk memperbarui kekuatan nuklirnya berbasis hulu ledak. Ketiga, dalam paket NPT, non proliferasi nuklir harus dikaitkan dengan

pelucutan senjata nuklir. Namun, pada masa lalu upaya yang telah dilakukan tidak dengan mengurangi ketergantungan non proliferasi dan pelucutan senjata, tetapi hanya dengan non proliferasi saja (*Ibid*).

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a. Perkembangan nuklir Korea Utara menimbulkan kecemasan bagi negara-negara internasional dan negara tetangganya khususnya Amerika Serikat dan Korea Selatan
- b. Dalam menangani ancaman nuklir Korea Utara, Korea Selatan akhirnya bergabung kedalam *Proliferation Security Initiative (PSI)*.
- c. PSI merupakan upaya secara global dalam menghentikan penyelundupan senjata pemusnah masal dan PSI melakukan hal yang lebih intensif seperti

penyitaan terhadap kapal-kapal asing yang dicurigai membawa bahan-bahan nuklir untuk senjata.

I.9 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu langkah yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan, yang meliputi data-data yang bersumber dari buku-buku, surat kabar dan juga internet. Data-data tersebut akan penulis gunakan dalam penulisan ini dan penulis akan menganalisa menggunakan teori yang telah ditetapkan.

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

1.9.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama berupa dokumen resmi. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga penulis hanya mencari dan mengumpulkan seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan atau tulisan orang lain, dan lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan serta melalui media *online*.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang diklasifikasikan dan dikumpulkan dari sejumlah literature. Data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.9.4 Teknik Analisa Data

Data yang didapat kemudian dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk mendukung jawaban dari pertanyaan penelitian.

I.10 Sistematika Penulisan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Penulisan dibagi dalam 4 bab. Bab I membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, asumsi, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Perkembangan Nuklir Korea Utara dan *Proliferation Security Initiative* (PSI) berisi mengenai perkembangan nuklir Korea Utara dari awal hingga tahun 2012. Selain itu dalam bab ini juga dibahas mengenai profil PSI dari awal dibentuk, tujuan PSI, penjelasan mengenai kapan Korea Selatan masuk menjadi anggota PSI dan legalitas hukum PSI

Bab III Kerjasama Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Kerangka *Proliferation Security Initiative* (PSI) membahas mengenai dinamika ancaman nuklir Korea utara dan kerjasama yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam kerangka PSI. Selain itu, akan dibahas juga mengenai hambatan-hambatan dalam kerjasama tersebut

Bab IV Kesimpulan berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah penulis bahas dalam tiga bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih terfokus. Kemudian bab ini juga berisikan sara-saran atas hasil penelitian yang penulis dapatkan